

KAJIAN PAGU ANGGARAN RAPBN TA 2026 KOMISI VI

Pengarah

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI

Penanggungjawab

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA., PQIA
Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

Penulis

Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Mutiara Shinta Andini, S.E., M.E.K.K.

OVERVIEW PAGU RAPBN 2026 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

↑ **1.400,4**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

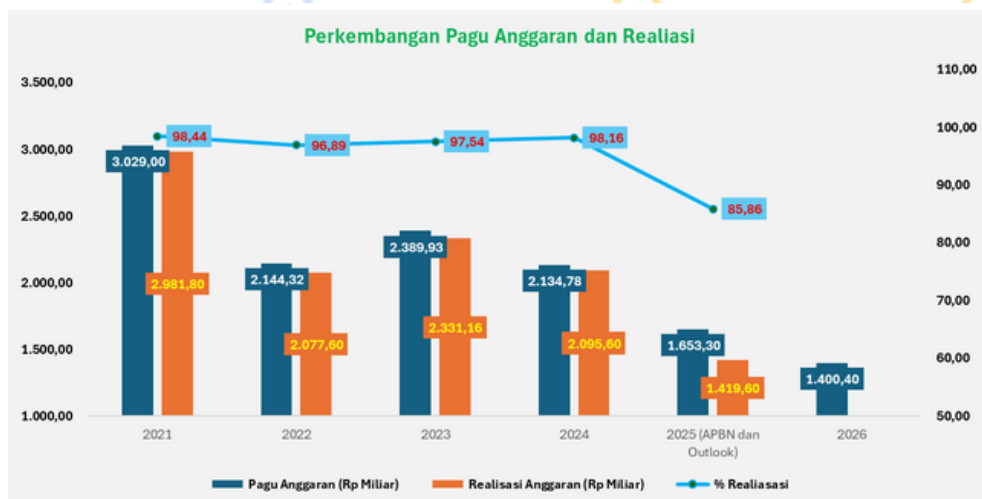
1.100,4

APBN 2025
(miliar Rp)

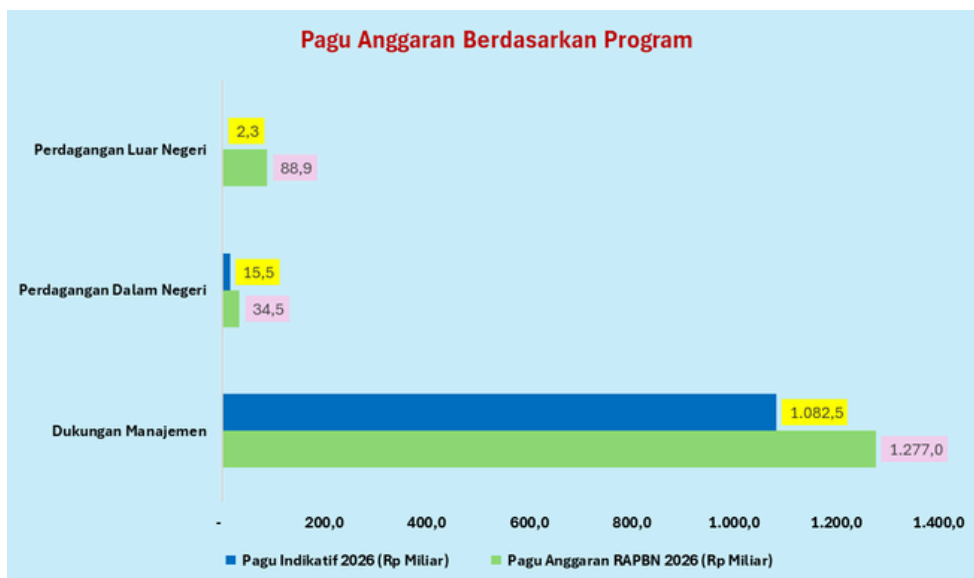
1.653,30

Outlook 2025
(miliar Rp)

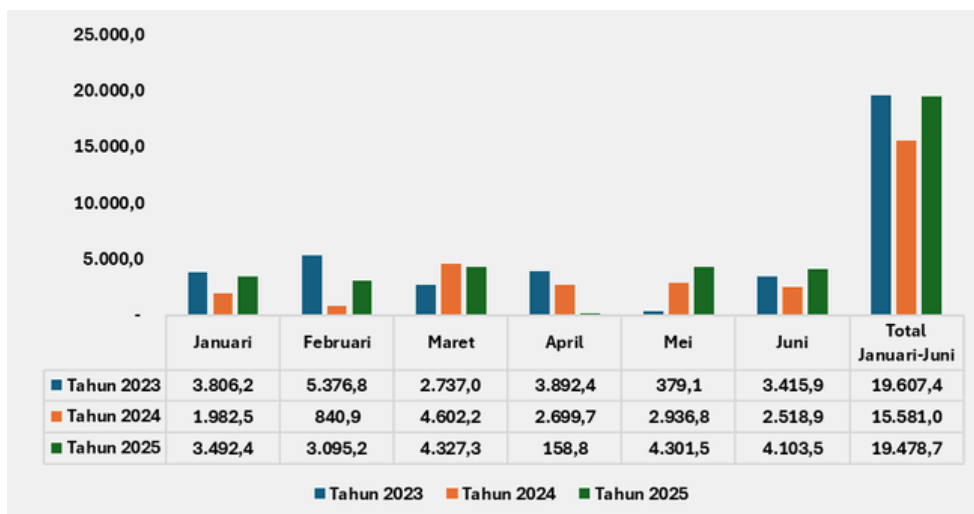
1.419,6



Belanja per Program Rp (miliar)



Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Rp (Juta US\$)



Highlights Overview Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan

- **Pagu anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2026 mengalami kenaikan** dibandingkan pagu indikatifnya dengan naik sebesar Rp300 miliar atau sebesar 27,26%. Namun, pagu anggaran dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan.
- **Pagu anggaran tahun 2026 setiap program menunjukkan kenaikan.** Program dukungan manajemen naik Rp194,5 miliar, program perdagangan dalam negeri naik Rp19 miliar, dan program perdagangan luar negeri naik Rp86,6 miliar.
- **Nilai neraca perdagangan dari selama periode bulan Januari-Juni tahun 2025 mencapai USD19.478,7.** Capaian ini lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD15.581 juta. Hal tersebut menunjukkan sektor perdagangan telah menunjukkan kinerja positif.
- Memburuknya perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi global semakin menekan perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun 2025, karena itu **Komisi VI DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk terus membuka akses pasar ekspor baru dengan memperkuat kerja sama perdagangan dengan penguatan diplomasi dan kolaborasi antarnegara.**

OVERVIEW PAGU RAPBN 2026

KEMENTERIAN KOPERASI

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)



937

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

311,7

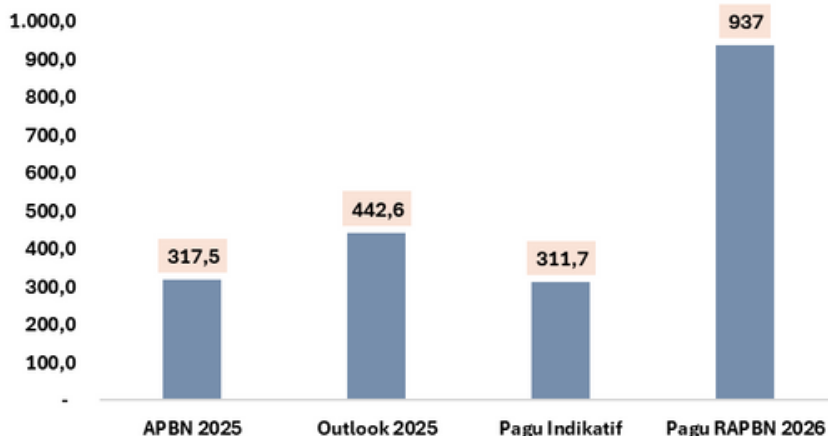
APBN 2025
(miliar Rp)

317,5

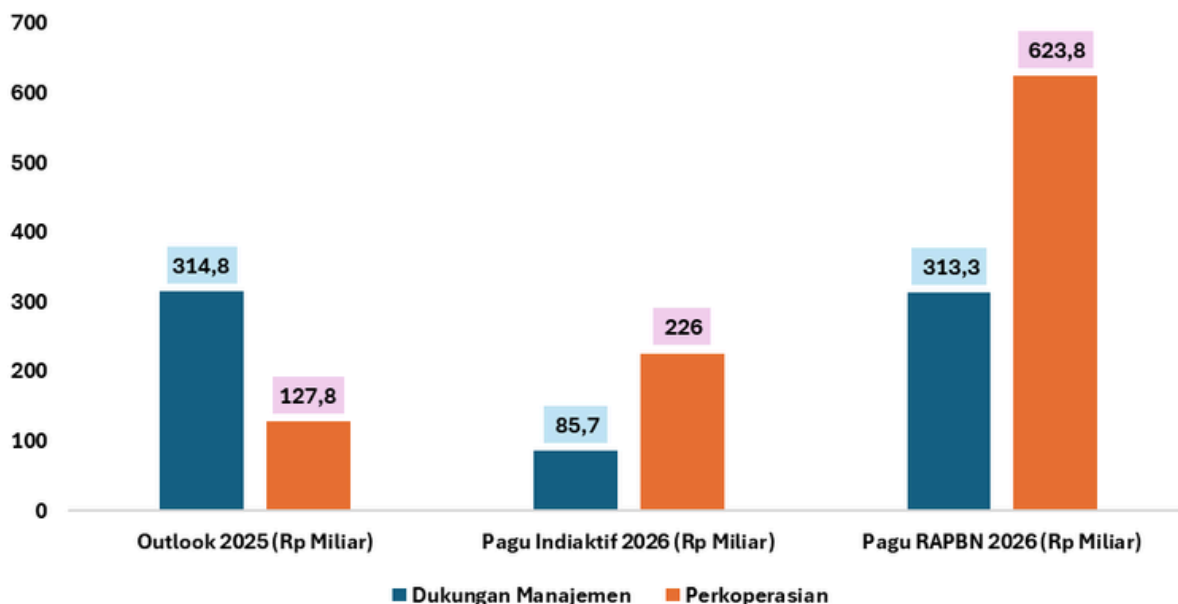
Outlook 2025
(miliar Rp)

442,6

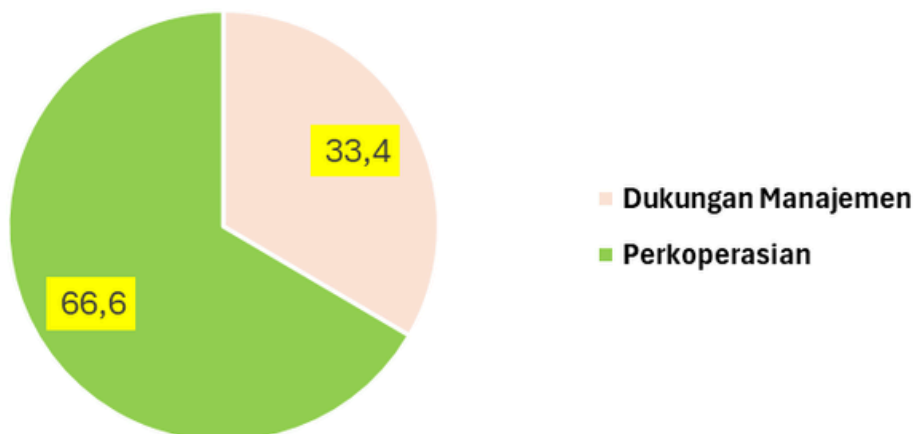
Pagu Anggaran (Rp Miliar)



ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM (Rp Miliar)



% Pagu Anggaran 2026



Highlights Overview Pagu Anggaran Kementerian Koperasi

- **Pagu anggaran Kementerian Koperasi pada tahun 2026 mengalami kenaikan** dari pagu indikatif dengan kenaikan sebesar Rp625,30 miliar atau sebesar 200,61%. Peningkatan anggaran ini harus dapat meningkatkan pemberdayaan koperasi yang telah dibentuk dalam rangka dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, memutus rantai kemiskinan, ketahanan pangan, dan pemerataan kesejahteraan.
- **Anggaran tetap konsisten diprioritaskan untuk pengembangan dan pemberdayaan perkoperasian.** Anggaran ini diharapkan mampu mendorong dan percepatan peningkatan baik jumlah maupun kualitas koperasi.
- **Koperasi aktif bersertifikat NIK menurut data Kementerian Koperasi per 31 Desember 2023 hanya sebanyak 45.794 koperasi atau hanya 35,19%** dari total koperasi sebanyak 130.119 koperasi.
- **Akses permodalan koperasi dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) perlu perbaikan,** karena penyaluran dana bergulir melalui LPDB merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung kebutuhan pembiayaan koperasi tetapi penyaluran dana yang sering terkendala oleh mekanisme administratif yang kompleks, termasuk persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi oleh sebagian koperasi. LPDB perlu membuat klasifikasi usaha koperasi (seperti koperasi besar, koperasi kecil, dan koperasi mikro) sehingga sehingga pembiayaan koperasi besar, koperasi kecil dan koperasi mikro berbeda persyaratannya. Seperti, persyaratan untuk koperasi mikro dengan skema pinjaman tanpa agunan.

Highlights Overview Pagu Anggaran Kementerian Koperasi

- **Kewenangan pembinaan dan pengembangan koperasi memiliki kendala dalam hal kewenangan antara kabupaten/kota dan provinsi.** Kewenangan sebaiknya perlu diatur dalam suatu regulasi sehingga pembinaan dan pengembangan koperasi dapat efektif dan tidak tumpang tindih. Kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi selama ini sangat berpotensi dilakukan berulang, seperti Pemerintah Kabupaten/Kota dan provinsi melakukan pembinaan kepada koperasi yang sama.
- **Kepastian hukum untuk penguatan kelembagaan koperasi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi sangat diperluka saat ini,** karena itu Komisi VI DPR RI dan Kementerian Koperasi perlu segera membentuk Undang-Undang Perkoperasian yang baru mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sudah tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi dan perkembangan teknologi saat ini.

OVERVIEW PAGU RAPBN 2026 BPKPB SABANG

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

↑ **36,50**

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

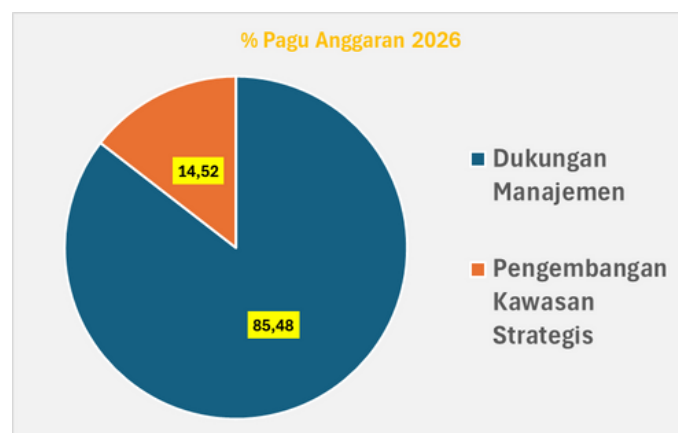
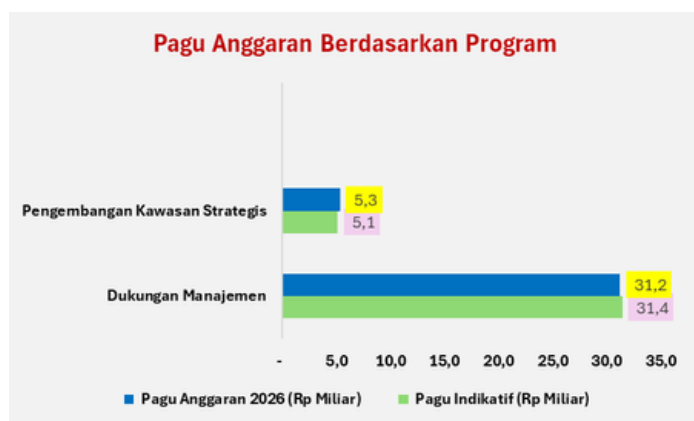
1.100,4

APBN 2025
(miliar Rp)

53,5

Outlook 2025
(miliar Rp)

27,50



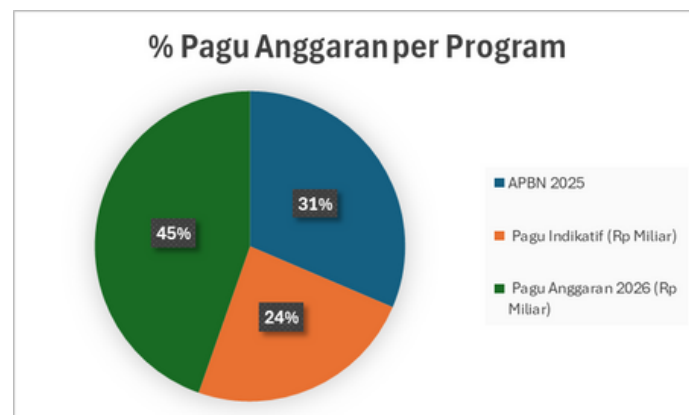
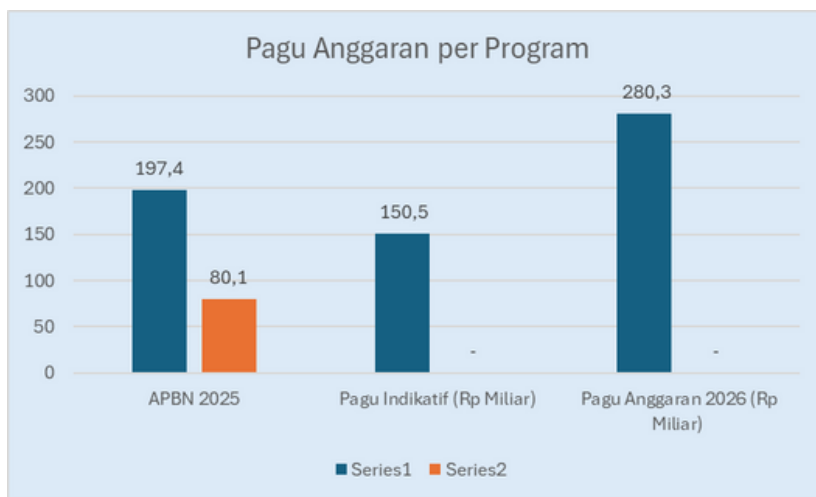
Highlights Overview Pagu Anggaran BPKS

- Pagu anggaran BPKS selama periode tahun 2020-2026 mengalami tren penurunan,** pagu anggaran dari Rp110,10 miliar tahun 2020 menjadi Rp36,50 tahun 2026. Pagu anggaran tahun 2026 merupakan nilai terendah selama periode tahun 2020-2026 dengan rata-rata penurunan sebesar 16,12%. Selain itu, pagu anggaran tahun 2026 mengalami penurunan tertinggi selama periode tahun 2020-2026 dengan penurunan sebesar negatif 31,78% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
- Realisasi anggaran selama periode tahun 2021-2024 rata-rata hanya mencapai 89,03%.** Capaian ini yang masih di bawah 90% tentunya perlu ditingkatkan lagi supaya pelaksanaan program-program BPKS dapat meningkat dalam memberikan pelayanan.

- **Komisi VI DPR RI perlu mendorong** BP Sabang beserta seluruh stakeholder guna mengoptimal promosi Sabang sebagai destinasi investasi ke dunia internasional guna meraih investasi yang lebih maksimal. Infrastruktur pelabuhan Sabang juga perlu segera diintegrasikan dengan ke pelabuhan lainnya di Indonesia sehingga memudahkan investor ketika hendak menggunakan pelabuhan Sabang sebagai Hub Internasional.
- **Guna menarik investasi BP Sabang perlu memodernisasi pelabuhan Sabang,** memastikan pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan usaha di bidang perdagangan barang dan jasa yang berstandar internasional. Perbaikan infrastruktur penunjang investasi, perbaikan pelayanan birokrasi, peningkatan sarana usaha serta diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM juga perlu dipertimbangkan oleh BP Sabang.
- Lokasi Sabang yang berada di lintas Selat Malaka dan dilintasi setidaknya 5.000 kapal setiap tahunnya merupakan potensi bagi wilayah Sabang untuk emergency call port (pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan darurat). **Komisi VI DPR RI dapat meminta BP Sabang guna mengkaji peluang dan kesiapan Sabang menjadi emergency call port.**

OVERVIEW PAGU RAPBN 2026 KEMENTERIAN BUMN

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)
↑ 280,30
Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)
150,5
APBN 2025 (miliar Rp) **277,5**
Outlook 2025 (miliar Rp) **136,50**



Highlights Overview Pagu Anggaran Kementerian BUMN

- Sejak tahun 2021 pasca pandemi hingga tahun 2026, alokasi anggaran Kementerian BUMN menunjukkan tren meningkat meskipun realisasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan Nota Keuangan APBN dan dokumen KEM PPKF 2026, pagu anggaran Tahun 2026 Kementerian BUMN naik dari yang awalnya sebesar Rp150,5 miliar di pagu indikatif 2025 menjadi Rp280,3 miliar. Kenaikan ini menggambarkan adanya kebutuhan untuk memperkuat fungsi regulasi, pembinaan, serta pengawasan BUMN sebagai agen pembangunan sekaligus kontributor fiskal negara.

- Dari sisi indikator kinerja anggaran, serapan anggaran Kementerian BUMN pada tahun 2023 pernah di bawah 95%, bahkan prognosa dan realisasi sementara tahun 2025 juga tidak cukup baik dengan hanya 49,2% per Juli 2025. Hal tersebut dalam Nota Keuangan APBN dipengaruhi oleh keterlambatan tender, penyesuaian ulang program mengikuti dinamika kebijakan, serta *carry-over* kegiatan digitalisasi. Kondisi ini memperlihatkan *bottleneck* implementasi yang perlu diperhatikan pada level proses (perencanaan pengadaan, kesiapan dokumen, dan integrasi sistem).
- **Kinerja serapan yang “cukup baik” belum otomatis** berbanding lurus dengan *outcome* kebijakan, sehingga penguatan manajemen proyek dan tata kelola pengadaan menjadi prasyarat agar setiap rupiah belanja menghasilkan perbaikan nyata dalam pengawasan, mitigasi risiko, dan sinyal kinerja ke BUMN di sektor-sektor strategis.
- **Arsitektur baru pasca-ditetapkannya UU No. 1/2025** menghadirkan Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara). Menteri BUMN tetap memegang kontrol strategis melalui saham Seri A Dwiwarna, sedangkan Danantara memegang 99% saham Seri B pada *holding* operasional maupun investasi. Desain ini memisahkan fungsi pengawasan dari pengelolaan portofolio dengan harapan profesionalisme dan efisiensi meningkat. Namun, secara fiskal, transisi ini menekan penerimaan negara: PNB semester I/2025 berkontraksi 22,7% *yoy*, *outlook* PNB 2025 turun ke Rp477,23 triliun (-18,3%), sedangkan Pendapatan KND anjlok 86,3% menjadi Rp11,83 triliun, dan proyeksi 2026 tinggal Rp1,80 triliun (-84,8%). *Shortfall* ini menuntut strategi fiskal baru, termasuk optimalisasi dividen yang tersisa serta perbaikan efisiensi BUMN.

- **Risiko fiskal utama periode 2024–2026 mencakup:**

1. Pembiayaan infrastruktur, dengan sovereign guarantee untuk pinjaman PLN, ITDC, dan Geo Dipa; risiko utamanya terkait keterlambatan COD dan operasional.
2. Penjaminan PEN senilai Rp10,31 triliun yang masih berjalan, tanpa klaim tetapi tetap menyimpan potensi eksposur.
3. Ketahanan pangan, dengan alokasi OIP Rp22,07 triliun untuk Bulog; risiko muncul jika cadangan tidak terserap optimal.
4. Energi, PLN menunjukkan kinerja membaik, sementara Pertamina masih terpapar volatilitas global; disiplin subsidi dan kompensasi penting untuk menjaga rasio leverage.
5. Konstruksi/infrastruktur, menghadapi tantangan likuiditas dan leverage tinggi, yang berisiko menular ke sektor perbankan dan pasar modal bila tidak terkendali.

Prospek dan Rekomendasi Kebijakan

Ke depan, pergeseran arsitektur melalui Danantara menuntut desain kebijakan yang menyeimbangkan optimalisasi portofolio dan ketahanan fiskal. Di level pusat, Kementerian BUMN perlu menajamkan penganggaran berbasis kinerja (*outcome-based budgeting*) dengan indikator kuantitatif yang mengaitkan setiap rupiah belanja pada perbaikan tata kelola sektor misalnya, pengurangan temuan pengawasan, waktu siklus pengadaan, atau peningkatan kepatuhan pelaporan portofolio. Hal ini penting mengingat dominasi belanja dukungan manajemen dan catatan serapan yang belum tuntas mendekati 100%.

Pada tingkat ekosistem BUMN, **Pemerintah** bersama **Komisi VI DPR RI dapat mendorong penguatan *outcome-based budgeting*, *ring-fencing risiko* (*risk-based guarantee*, *escrow account*, *early-warning system* dengan *Altman Z-score*), serta evaluasi *ex-post* atas efektivitas dukungan fiskal.** Pada pangan, kontrak kinerja Bulog perlu ditautkan ke kecepatan penyaluran; pada energi, kepastian pembayaran subsidi dan monitoring proyek *direct lending* jadi prasyarat utama. Sementara **pada level fiskal-makro, Pemerintah perlu mengelola transisi penerimaan dividen** melalui transparansi kinerja Danantara, termasuk target imbal hasil, biaya, dan proporsi reinvestasi vs setoran ke APBN. Tanpa disiplin implementasi, pergeseran arsitektur ini berpotensi melemahkan ketahanan fiskal alih-alih memperkuatnya

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

2.447,9

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

2.447,9

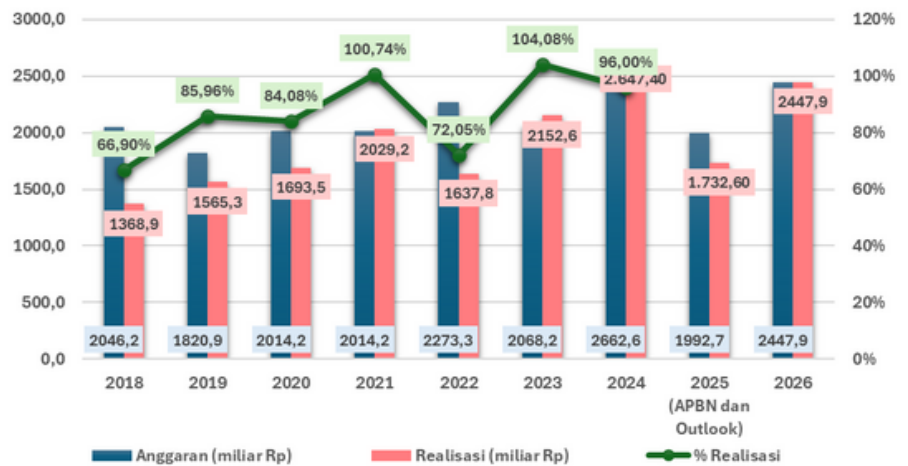
APBN 2025
(miliar Rp)

1992,7

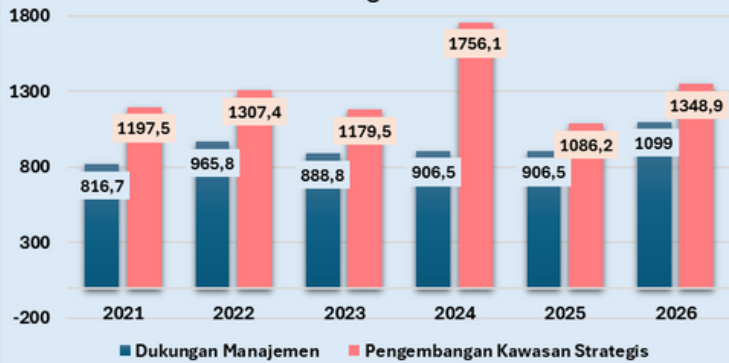
Outlook 2025
(miliar Rp)

1.732,6

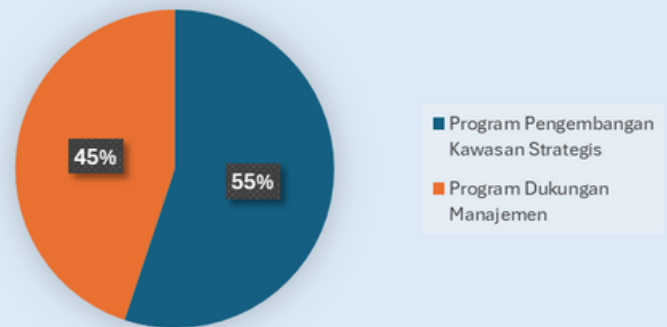
Perkembangan Anggaran dan Capaian Realisasi BP Batam Tahun 2018-2026



Perkembangan Pagu Belanja K/L Berdasarkan Program



Komposisi Anggaran 2026



Highlights Overview Pagu Anggaran BPKPB BATAM

1. Tren Pagu dan Realisasi Anggaran BP Batam (2018-2026)

Selama hampir satu dekade terakhir, pagu anggaran BP Batam cenderung meningkat meskipun fluktuatif, dengan puncak alokasi pada 2024 sebesar Rp2,66 triliun, lalu turun ke Rp1,99 triliun pada 2025 sebagai dampak efisiensi Inpres No. 1/2025, dan kembali naik menjadi Rp2,45 triliun pada 2026 sama dengan pagu indikatif yang ditentukan. Angka ini menjadikan BP Batam salah satu lembaga non-kementerian dengan alokasi terbesar secara nasional. Namun, capaian realisasi anggaran yang sempat konsisten di bawah 90% pada tahun 2018-2022, menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa besarnya resiko alokasi belum sejalan dengan kapasitas serapan dan efektivitas implementasi program. Dalam perspektif kebijakan fiskal yang mengedepankan efisiensi belanja (spending better), kondisi ini layak dievaluasi karena alokasi besar seharusnya diikuti oleh output yang konkret terhadap indikator makro maupun sektoral.

2. Ketergantungan Berlebihan pada PNBPN Berbasis Lahan

Data menunjukkan bahwa struktur pendanaan BP Batam sangat bergantung pada PNBPN, terutama dari pemanfaatan lahan. Pada APBN 2024, 80,36% anggaran bersumber dari PNBPN, bahkan di 2025 naik menjadi 99,29%. Ketergantungan ini rentan, karena ketersediaan lahan semakin terbatas akibat perluasan kawasan industri dan proyek strategis. Hal ini sejalan dengan temuan **BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023**, yang menekankan risiko keberlanjutan PNBPN berbasis aset tetap karena keterbatasan daya dukung lahan (BPK RI, 2024). Ketergantungan tunggal seperti ini dapat melemahkan fleksibilitas fiskal BP Batam dalam jangka panjang.

3. Keterlambatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN)

Beberapa PSN di Batam seperti Rempang *Eco-City* masih menghadapi masalah sosial, lahan, dan regulasi. Padahal, PSN merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang masuk dalam **Perpres No. 109/2020** tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ketidaktepatan waktu penyelesaian PSN tidak hanya menghambat target pembangunan kawasan, tetapi juga merugikan citra Batam sebagai destinasi investasi internasional.

4. Kebutuhan Digitalisasi dan Reformasi Regulasi

Meski RAPBN 2026 menekankan digitalisasi birokrasi dan percepatan perizinan, hingga kini laporan publik menunjukkan bahwa proses perizinan di Batam masih relatif panjang dan rumit (**BKPM, 2023**). Reformasi regulasi dan percepatan layanan digital sangat mendesak agar Batam benar-benar kompetitif. Tanpa reformasi mendalam, potensi realisasi investasi yang tinggi (Batam mencatat Rp17,8 triliun pada 2023 – BKPM, 2024) bisa terhambat oleh inefisiensi administratif.

5. Risiko Sosial dan Lingkungan

Pembangunan kawasan baru seperti Rempang *Eco-City* menghadapi resistensi sosial terkait relokasi masyarakat dan isu keberlanjutan lingkungan. Kritik dari berbagai lembaga masyarakat sipil, seperti **WALHI (2023)**, menyoroti kurangnya konsultasi publik dan dampak ekologis terhadap pesisir Batam. Tanpa pengelolaan yang inklusif, penggunaan anggaran besar untuk proyek ini berpotensi menimbulkan konflik sosial yang melemahkan kepercayaan investor.

6. Penyerapan Anggaran Belum Optimal

Dalam tahun 2024, BP Batam menghadapi kendala rendahnya serapan anggaran akibat keterlambatan pekerjaan dan pelaksanaan PSN yang terkendala di lapangan. Kementerian Keuangan dalam **Nota Keuangan APBN 2025** menegaskan bahwa belanja infrastruktur harus diarahkan pada proyek yang siap dilaksanakan (readiness criteria). Rendahnya serapan tidak hanya menimbulkan dampak ke tahun berikutnya, tetapi juga mengurangi *multiplier effect* fiskal yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi Batam (Kemenkeu, 2024).

Rekomendasi: Penguatan Akuntabilitas dan Integrasi Fiskal

Isu BP Batam pada periode 2024–2026 menunjukkan adanya Ketergantungan pada PNPB berbasis lahan, rendahnya serapan anggaran, serta keterlambatan PSN merupakan tantangan mendasar. Untuk menjadikan Batam sebagai pusat investasi global, BP Batam perlu melakukan diversifikasi sumber pendanaan (misalnya melalui skema KPBU atau pinjaman pembangunan), mempercepat digitalisasi perizinan, serta memastikan pembangunan berorientasi keberlanjutan sosial dan lingkungan. **Pemerintah** dan **Komisi VI DPR RI** perlu mendorong penguatan tata kelola *output* belanja BP Batam, termasuk kewajiban menyampaikan indikator dampak ekonomi secara berkala. Penguatan BP Batam tidak cukup dari sisi alokasi, tetapi harus disertai dengan integrasi peran fiskal bersama Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan BKPM. Hanya dengan pendekatan lintas sektor dan tata kelola yang transparan, belanja BP Batam yang mencapai lebih dari Rp2 triliun per tahun benar-benar bisa mendorong pertumbuhan investasi produktif dan kontribusi fiskal dari kawasan perdagangan bebas Batam.

Pagu RAPBN 2026 (miliar Rp)

163,5

Pagu Indikatif 2026 (miliar Rp)

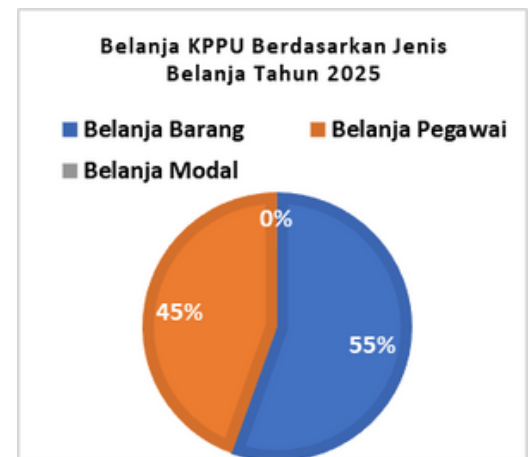
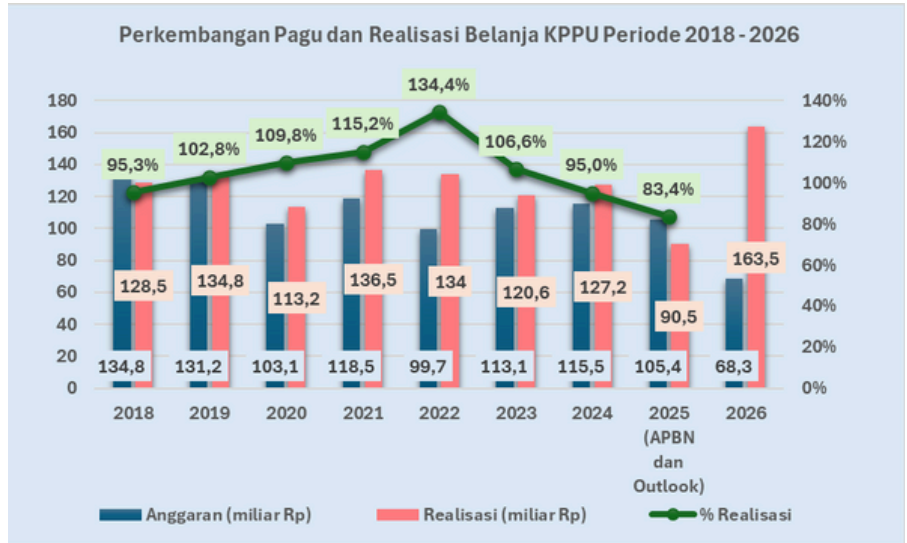
68,3

APBN 2025
(miliar Rp)

105,4

Outlook 2025
(miliar Rp)

90,5



Highlights Overview Pagu Anggaran KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang mandat penting sebagai pengawas praktik monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008, serta Perpres Nomor 100 Tahun 2024. Mandat kelembagaan ini semakin meluas dengan adanya perluasan tugas pengawasan kemitraan dalam UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Namun, dukungan anggaran yang tersedia masih menghadapi sejumlah isu strategis yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas kelembagaan.

Dalam APBN 2024, KPPU memperoleh anggaran audited sebesar Rp127,2 miliar, dengan komposisi 49,64% dari Rupiah Murni dan 50,35% dari PNBPN. Alokasi ini diarahkan untuk program pengawasan persaingan usaha (Prioritas Nasional) dan program dukungan manajemen. Anggaran tersebut berkontribusi nyata pada peningkatan Indeks Persaingan Usaha (IPU) dari 4,91 pada 2023 menjadi 4,95 pada 2024, pengawasan kemitraan perkebunan plasma seluas 25.692 hektar yang menguntungkan 12.499 kepala keluarga, serta perlindungan lebih dari 4.000 mitra pengemudi aplikasi daring yang memperoleh kembali haknya. Namun, capaian IPU tersebut masih di bawah target (5,00), sementara untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% diperlukan lonjakan IPU hingga 6,33, yang membutuhkan dukungan anggaran jauh lebih besar.

Pada APBN 2025, pagu KPPU turun menjadi Rp105,4 miliar. Alokasi ini tetap digunakan untuk penegakan hukum strategis, termasuk putusan terhadap Google Play Billing System dengan denda Rp202,5 miliar, kasus tender PDAM Lombok Utara (Rp12 miliar), serta penilaian 63 notifikasi merger senilai Rp244,05 triliun. Meski KPPU berhasil menjaga fungsi pengawasan, penurunan pagu ini memperlihatkan adanya tekanan fiskal yang berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik. Tantangan utama pada periode ini adalah keterbatasan anggaran untuk memperluas survei IPU, keterlambatan penyusunan aturan turunan Perpres No. 100/2024, dan belum optimalnya transformasi digital layanan di 38 provinsi.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah merencanakan peningkatan pagu menjadi Rp163,5 miliar. Alokasi ini akan diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional PN-05: hilirisasi industri berbasis SDA, PP-05: peningkatan perdagangan domestik dan ekspor, serta KP-08: peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Dari total pagu, 49,2% diarahkan untuk program inti pengawasan persaingan usaha dan kemitraan, sementara 6,7% untuk program dukungan manajemen. Kenaikan pagu ini mencerminkan pengakuan atas urgensi penguatan kelembagaan KPPU, tetapi juga menuntut tata kelola yang lebih fokus pada outcome, bukan hanya penyerapan anggaran. Beberapa poin utama dalam isu anggaran KPPU diantaranya adalah:

1. Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran (2018–2026)

Alokasi anggaran KPPU mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam periode 2020–2023, dari Rp103,09 miliar pada 2020 menjadi Rp134,8 miliar pada 2023. Namun, tahun 2026 menunjukkan penurunan tajam ke Rp68,3 miliar (indikatif), terutama akibat pemotongan pasca Inpres No. 1 Tahun 2025. Sebelumnya, pada 2025, pagu KPPU sebesar Rp105,37 miliar dipangkas sekitar 36% atau senilai Rp37,9 miliar. Hal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa dukungan fiskal terhadap kelembagaan KPPU semakin mengalami tekanan yang berpotensi mengganggu kontinuitas fungsi strategisnya dalam program pengawasan persaingan usaha.

2. Tingkat Realisasi Anggaran yang Konsisten Tinggi

Meski pagu berfluktuasi, tingkat realisasi anggaran KPPU relatif tinggi dan bahkan melampaui target. Pada 2022, rasio realisasi mencapai 109,81%, dan pada 2023 sebesar 115,2%. Hal ini mencerminkan disiplin fiskal dan efisiensi administratif dalam pelaksanaan anggaran. Berkaitan dengan capaian realisasi anggaran ini dapat juga diinterpretasikan bahwa ada kebutuhan alokasi anggaran lebih terhadap KPPU. Hal ini dapat menandakan juga bahwa keberhasilan serapan anggaran perlu dilengkapi dengan keberhasilan dalam transformasi struktural belanja agar mendukung output kebijakan yang lebih berdampak pada pasar.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Secara keseluruhan, isu strategis anggaran KPPU terletak pada mismatch antara semakin luasnya mandat kelembagaan dengan kapasitas fiskal yang sempat menurun, dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal, serta keterbatasan dalam memperluas digitalisasi layanan dan pengawasan daerah. Oleh karena itu, penguatan pagu 2026 harus diikuti dengan rebalancing alokasi untuk memperbesar porsi pada program inti pengawasan, investasi teknologi informasi, dan pembangunan basis data pasar. Tanpa langkah ini, efektivitas KPPU dalam mendorong iklim usaha yang sehat, mendukung target IPU, serta menjaga keadilan ekonomi berisiko melemah.

KAJIAN PAGU ANGGARAN RAPBN TA 2026

 www.bkd.dpr.go.id

 [pa3kn.bkdprri](https://www.instagram.com/pa3kn.bkdprri)

**Pusat Analisis Anggaran dan
Akuntabilitas Keuangan Negara**